

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian atas kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai yang memiliki usaha sampingan pada masa pandemi Covid-19 di wilayah KPP Pratama Pati, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian masyarakat. Terdapat masyarakat yang perekonomiannya menurun akibat pandemi Covid-19. Dalam menghadapi hal tersebut, terdapat masyarakat yang melakukan usaha sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Usaha sampingan yang dilakukan tersebut mampu membantu perekonomian masyarakat dalam menghadapi pandemi. Namun, walaupun memiliki usaha sampingan, terdapat beberapa pihak yang masih kesulitan karena usaha sampingannya juga ikut terdampak pandemi. Usaha sampingan seperti perdagangan kecil ikut terdampak pandemi di mana penghasilan dari usaha tersebut juga ikut menurun. Tetapi, dengan adanya tekanan tersebut masih banyak masyarakat yang mampu bertahan dengan usaha sampingannya selama pandemi Covid-19.
2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai yang memiliki usaha sampingan di wilayah KPP Pratama Pati dan menjadi objek dalam penelitian

ini masih tergolong rendah. Adanya penerapan PP 23 Tahun 2018 serta insentifnya selama pandemi masih belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya pemahaman Wajib Pajak atas kewajiban pelaporan PPh atas usaha sampingan. Kedua, faktor dari Wajib Pajak sendiri. Kurangnya kemauan dari Wajib Pajak dalam memahami sistem perpajakan membuat Wajib Pajak kurang patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan atas usaha sampingan tersebut.

3. Dalam mengawasi kepatuhan Wajib Pajak, KPP Pratama Pati melakukan beberapa upaya. Upaya tersebut diantaranya melakukan pengecekan data Wajib Pajak untuk menguji kebenaran pelaporannya dan menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam proses tersebut, KPP Pratama Pati mendapati beberapa kendala. Terdapat Wajib Pajak yang memiliki alamat tidak lengkap atau tidak sesuai pada kenyataannya. Untuk pengawasan terhadap usaha sampingan yang dilakukan Wajib Pajak pegawai, terdapat hambatan dalam mencari informasi mengenai usaha sampingan tersebut. KPP Pratama Pati juga memiliki beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses pengawasan tersebut, seperti melakukan pembaruan data Wajib Pajak setiap tahun, mengadakan kunjungan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui potensi serta kebenaran alamat Wajib Pajak, melakukan koordinasi kepada kecamatan atau desa tertentu untuk melakukan program Layanan di Luar Kantor.